

## REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN TA 2025

**NAMA SKPD/OPD** : KAPANEWON KRETEK  
**Tujuan** : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel  
**Sasaran Strategis** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat  
**Indikator Kinerja Utama** : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Kode						Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Tujuan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu	Ket
									No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>																						
<b>2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>																						
2	22	08	5.07	06		Gelar Budaya Jogja	30,000,000	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta di Kap Kretek	1	Keterlambatan atau ketidakhadiran penampil	Jadwal yang tidak dikonfirmasi dengan baik atau kendala transportasi	C	Gangguan pada alur acara pelaksanaan gelar budaya	Konfirmasi kehadiran sebelum acara, menyediakan penampil cadangan	1	3	3	R	Menyusun rundown dengan fleksibilitas dan mengatur alternatif hiburan dadakan	Kepala Jawatan Sosial	Agustus 2025	
									2	Kepadatan atau keriuhan penonton	Antusiasme tinggi tanpa pengaturan yang baik, kurangnya petugas keamanan	C	Potensi kecelakaan, ketidaknyamanan bagi peserta dan penonton	Menyediakan petugas keamanan, pembatas area, dan pengaturan alur keluar-masuk	1	3	3	R	Berkoordinasi dengan pihak keamanan profesional dan tim medis			
<b>4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>																						
<b>4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>																						
4	01	04	5.01	07		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	96,995,100	Terlaksananya penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon dan kalurahan	1	Keterlambatan penyusunan dokumen terkait reformasi kalurahan dan pendataan sosial ekonomi	Data pendukung belum lengkap dan kurangnya koordinasi dengan kalurahan	C	Terlambatnya penyusunan dokumen laporan reformasi kalurahan dan pendataan sosial ekonomi	Penyusunan jadwal dan batas waktu monitoring dan pengumpulan data reformasi kalurahan dan pendataan sosial ekonomi	1	3	3	R	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan kalurahan	Kepala Jawatan Kemakmuran	Januari s.d Desember 2025	
<b>7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																						
<b>7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																						
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,800,000	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan tepat waktu	1	Keterlambatan penyusunan dokumen	Data pendukung belum lengkap atau keterlambatan koordinasi antar pihak terkait	C	Terlambatnya pelaksanaan program/kegiatan	Penyusunan timeline dengan batas waktu pengumpulan data	1	3	3	R	Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah melalui sistem informasi	Ka.Subbag Progran dan Keuangan	Januari s.d Desember 2025	
									2	Data yang tidak akurat atau tidak lengkap	Kesalahan input data, keterbatasan sumber data, atau kurangnya verifikasi	C	Dokumen perencanaan tidak valid dan berdampak pada keputusan yang salah	Verifikasi data secara berkala dan melakukan validasi dari sumber terpercaya	1	3	3	R	Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data			

Kode						Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Tujuan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu	Ket
									No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,800,000	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1	Keterlambatan dalam proses evaluasi	Kurangnya sumber daya, kendala administratif, atau banyaknya unit yang harus dievaluasi	C	Terlambatnya perbaikan kinerja perangkat daerah	Penyusunan timeline yang ketat dan monitoring progres berkala	1	3	3	R	Menambah personel atau mengoptimalkan sistem evaluasi berbasis teknologi	Ka.Subbag Progran dan Keuangan	Januari s.d Desember 2025	
									2	Data kinerja tidak akurat atau tidak lengkap	Kesalahan input, keterlambatan pelaporan, atau kurangnya koordinasi antar unit	C	Hasil evaluasi tidak valid, pengambilan keputusan tidak optimal	Standarisasi pelaporan dan verifikasi data sebelum evaluasi	1	3	3	R	Meningkatkan sistem pemantauan kinerja dan melakukan pelatihan pengelolaan data			
7	01	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,100,009,137	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	1	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Keterlambatan pencairan anggaran atau proses administrasi yang tidak lancar	C	ASN mengalami keterlambatan dalam menerima haknya, memengaruhi kesejahteraan dan motivasi kerja	Penyusunan jadwal pembayaran yang jelas dan koordinasi dengan pihak keuangan	1	3	3	R	Digitalisasi proses pembayaran dan peningkatan koordinasi dengan bank maupun BPKPAD	Ka.Subbag Progran dan Keuangan	Januari s.d Desember 2025	
									2	Kesalahan perhitungan gaji dan tunjangan	Human error dalam input data atau sistem penggajian yang tidak akurat	C	ASN menerima jumlah yang tidak sesuai, menimbulkan keluhan dan perlu koreksi	Penggunaan sistem penggajian terintegrasi dan pengecekan berlapis	1	3	3	R	Pelatihan bagi petugas/bendhara gaji dan audit berkala			
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Keterlambatan Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	Keterlambatan pencairan honorarium peangggungjawab pengelola keuangan atau proses administrasi yang tidak lancar	C	Penanggungjawab pengelola keuangan mengalami keterlambatan dalam menerima haknya, memengaruhi kesejahteraan dan motivasi kerja	Penyusunan jadwal pembayaran yang jelas dan koordinasi dengan pihak keuangan	1	3	3	R	Digitalisasi proses pembayaran dan peningkatan koordinasi dengan bank dan instansi terkait	Ka.Subbag Progran dan Keuangan	Maret, Juni, Sept, Nov, Des 2025	
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	900,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	1	Kesalahan pencatatan transaksi	Human error, kurangnya verifikasi data	C	Laporan keuangan tidak akurat, potensi temuan pemeriksaan	Sistem akuntansi terotomasi, prosedur verifikasi	1	1	1	R	Pelatihan staf & peningkatan sistem validasi	Ka.Subbag Progran dan Keuangan	Januari s.d Desember 2025	

Kode						Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Tujuan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu	Ket							
									No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
7						01						01						2.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7	01	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	625,000	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Keterlambatan dalam evaluasi kinerja	Kurangnya koordinasi, sistem monitoring lemah	C	Pengambilan keputusan terkait promosi dan pelatihan tertunda	Jadwal evaluasi yang ketat, sistem pengingat otomatis	1	4	4	R	Digitalisasi dan otomatisasi evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Januari s.d Desember 2025								
									2	Kurangnya partisipasi pegawai dalam evaluasi	Pegawai merasa evaluasi tidak berdampak, kurangnya	C	Hasil evaluasi kurang akurat, keterbatasan data	Sosialisasi manfaat evaluasi, sistem feedback dua	1	4	4	R	Peningkatan keterlibatan pegawai melalui survei & diskusi										
7						01						01						2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,501,852	Menjaga ketersediaan komponen alat listrik	1	mengganggu kinerja dan pelayanan publik	cadangan komponen listrik tidak ada	C	pelayanan masyarakat terganggu	Pengadaan cadangan komponen listrik	1	1	1	R	menjaga cadangan komponen listrik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari s.d Desember 2025								
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,000,680	memperlancar pelayanan kepada masyarakat	1	Stok perlengkapan kantor habis	Kesalahan perencanaan kebutuhan, kurangnya monitoring stok	C	Aktivitas terganggu, keterlambatan pekerjaan	Penerapan sistem manajemen inventaris	1	1	1	R	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tepat waktu	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari s.d Desember 2025								
7	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,658,120	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1	Keterlambatan penyediaan peralatan rumah tangga	proses pengadaan yang lama	C	Mengganggu kenyamanan bekerja dan pelayanan masyarakat	Penyediaan kebutuhan dan ketersediaan peralatan serta perlengkapan rumah tangga	1	4	4	R	Alokasi anggaran sesuai peruntukannya dan Pemetaan jumlah serta jenis kebutuhan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari s.d Desember 2025								
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,978,444	menambah bahan informasi kepada masyarakat	1	Keterlambatan pengadaan cetakan	Proses pengadaan yang lama, keterlambatan vendor	C	informasi kepada masyarakat tidak dapat menyeluruh	informasikan disampaikan melalui media sosial	1	1	1	R	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan lebih memadai	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari s.d Desember 2025								
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,653,000	meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	1	Keterlambatan pelaksanaan rapat	Jadwal tidak sinkron, peserta tidak hadir tepat waktu	C	Pengambilan keputusan tertunda	Penyusunan jadwal jauh hari, konfirmasi kehadiran	1	1	1	R	Peningkatan koordinasi dan sistem pengingat otomatis	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari s.d Desember 2025								
									2	Hasil rapat tidak terdokumentasi dengan baik	Tidak ada notulen resmi, kelalaian pencatatan	C	Kesepakatan sulit ditindaklanjuti, informasi hilang	Notulen wajib, rekaman rapat jika diperlukan	1	1	1	R	Penggunaan sistem dokumentasi digital										
7	01	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,057,000	Terpenuhinya kebutuhan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Kehilangan atau kerusakan arsip fisik	Penyimpanan tidak sesuai standar, bencana alam, atau kelalaian pegawai	C	Kegiatan yang memerlukan cetakan tertunda	Pemantauan jadwal, kontrak yang mengikat vendor	1	1	1	R	Evaluasi dan percepatan proses pengadaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari s.d Desember 2025								

Kode						Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Tujuan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu	Ket
									No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	01	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50,000,000	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Gangguan atau kegagalan sistem elektronik	Server down, serangan siber, atau infrastruktur IT tidak memadai	C	Layanan pemerintahan terganggu, data tidak dapat diakses	Penggunaan server cadangan dan firewall keamanan	1	2	2	R	Meningkatkan kapasitas server dan sistem keamanan siber	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari s.d Desember 2025	
<b>7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																						
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,200,000	Tersedianya belanja tagihan listrik dan telephone	1	Terputusnya aliran listrik dan telephone	Keterlambatan pembayaran tagihan listrik dan telephone	C	Kegiatan pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat	Pembayaran tagihan listrik dan telephone tepat waktu	1	4	4	R	Penyediaan anggaran tagihan listrik dan telephone serta koordinasi dengan pihak terkait	Kasubag Umum dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025	
7	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,400,000	Tersedianya jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Keterlambatan pengadaan peralatan kantor	Keterlambatan proses pengadaan atau masalah pada penyedia jasa	C	Terganggunya operasional kantor	Menyusun jadwal pengadaan yang lebih awal dan memastikan vendor memiliki track record baik	1	4	4	R	Menjalin kontrak dengan beberapa penyedia alternatif	Kasubag Umum dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025	
								2	Kerusakan atau kehilangan peralatan sebelum masa pakai optimal	Penggunaan yang tidak sesuai atau kurangnya perawatan	C	Biaya tambahan untuk perbaikan atau penggantian peralatan	Menyusun SOP penggunaan dan pemeliharaan peralatan kantor	1	4	4	R	Meningkatkan sistem inventarisasi dan monitoring aset				
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108,228,704	Tersedianya tenaga kontrak kebersihan, pelayanan dan keamanan	1	Keterlambatan honorarium tenaga kontrak kebersihan, pelayanan dan keamanan	Keterlambatan pencairan anggaran dan administrasi yg tidak lancar	C	Tenaga kontrak kebersihan, pelayanan, keamanan terlambat memperoleh hak nya	Penyusunan jadwal pembayaran yang jelas dan koordinasi yang baik dgn pihak terkait	1	4	4	R	Digitalisasi proses pembayaran dan peningkatan koordinasi dengan bank dan instansi terkait	Kasubag Umum dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025	
<b>7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																						
7	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131,853,500	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Keterlambatan servis kendaraan	Kurangnya jadwal pemeliharaan rutin, keterbatasan bengkel	C	Kerusakan lebih parah, biaya perbaikan meningkat	Pemeliharaan sesuai jadwal dan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu	1	4	4	R	Implementasi sistem pemeliharaan berbasis digital	Kasubag Umum dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025	

Kode						Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Tujuan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu	Ket
									No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									2	Pajak kendaraan terlambat dibayarkan	Kurangnya monitoring jadwal pajak, kelalaian administrasi	C	Denda keterlambatan, kendaraan tidak bisa digunakan	Sistem pengingat pajak, pencatatan jadwal pajak kendaraan	1	4	4	R	Digitalisasi pembayaran pajak dan pengingat otomatis			
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116,517,500	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1	Keterlambatan penyelesaian proyek	Perencanaan yang kurang matang, kendala cuaca, atau keterlambatan material	C	Gangguan operasional dan biaya tambahan	Jadwal servis berkala, monitoring kondisi kendaraan	1	4	4	R	Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan kontraktor	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Februari, Juni 2025	
									2	Kualitas pekerjaan tidak sesuai standar	Kurangnya pengawasan atau penggunaan material di bawah spesifikasi		Pengurangan umur bangunan dan potensi perbaikan ulang	Penerapan sistem kontrol kualitas dan inspeksi berkala	1	4	4	R	Meningkatkan supervisi dan meminta jaminan kualitas dari kontraktor			
<b>7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																						
<b>7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>																						
7	01	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5,250,000	Tersedianya kebutuhan koordinasi dengan instansi vertikal untuk menciptakan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	1	Kurangnya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan instansi vertikal	Perbedaan prioritas kebijakan, komunikasi yang tidak optimal	C	Pelaksanaan program tidak efektif, terjadi tumpang tindih kebijakan	Rapat koordinasi rutin antar instansi	2	3	6	R	Penyusunan mekanisme integrasi program berbasis data	Kepala Jawatan Praja	Maret, September 2025	
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12,750,000	Tersedianya kebutuhan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon	1	Kurangnya koordinasi antar unit kerja di kecamatan	Minimnya rapat koordinasi, komunikasi yang tidak efektif	C	Pelaksanaan program tidak sinkron, duplikasi atau tumpang tindih kegiatan	Rapat koordinasi rutin, grup komunikasi lintas unit	1	4	4	R	Peningkatan sistem koordinasi berbasis digital	Kepala Jawatan Praja	Januari s.d Desember 2025	
<b>7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>																						
7	01	02	2.04	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13,919,000	Tersedianya kebutuhan media informasi dan tatap muka dalam mensosialisasikan pelayanan publik	1	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur nonperizinan	Sosialisasi minim, informasi tidak tersampaikan dengan baik	C	Banyak pengajuan tidak sesuai prosedur, proses menjadi lambat	Pembuatan panduan layanan, sosialisasi berkala	1	4	4	R	Digitalisasi layanan & penyediaan informasi online	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Januari s.d Desember 2025	

Kode						Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Tujuan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu	Ket
									No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									2	Proses layanan nonperizinan lambat	Sumber daya manusia terbatas, sistem manual	C	Kepuasan masyarakat menurun, meningkatnya complain	SOP pelayanan, monitoring waktu penyelesaian layanan	1	3	3	R	Automasi proses layanan dengan sistem digital			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	2.01			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>																
7	01	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20,000,000	Tersedianya kebutuhan kegiatan Musrenbang dan dukungan pemberdayaan masyarakat	1	Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat	Kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman manfaat Musrenbang	C	Keputusan tidak mewakili kepentingan masyarakat luas	Sosialisasi melalui berbagai media, pengingat melalui perangkat desa/kelurahan	2	3	6	R	Peningkatan kampanye/sosialisasi kesadaran partisipasi warga	Kepala Jawatan Kemakmuran	Januari s.d Desember 2025	
									2	Usulan masyarakat tidak tersampaikan dengan baik	Kurangnya dokumentasi, tidak adanya sistem pencatatan usulan yang jelas	C	Aspirasi tidak masuk dalam perencanaan daerah	Notulen resmi, sistem pencatatan digital	2	3	6	R	Pembangunan sistem pengelolaan aspirasi berbasis online			
7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63,897,000	Tersedianya kebutuhan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	1	Partisipasi masyarakat rendah	Kurangnya sosialisasi atau kurangnya minat masyarakat	C	Usulan pembangunan kurang mewakili kebutuhan riil	Meningkatkan sosialisasi sebelum musrenbang	2	3	6	R	Memanfaatkan media sosial dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi	Kepala Jawatan Sosial	Januari s.d Desember 2025	
									2	Usulan program tidak realistis atau tidak sesuai prioritas	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait keterbatasan anggaran dan skala prioritas	C	Pemborosan anggaran dan sulitnya eksekusi program	Memberikan panduan penyusunan usulan sebelum musrenbang	2	3	6	R	Mengadakan diskusi teknis sebelum musrenbang untuk filterisasi usulan			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	2.03			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>																
7	01	03	2.03	04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35,660,000	Tersedianya kebutuhan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	1	Kegagalan usaha masyarakat	Kurangnya pengalaman dan keterampilan dalam mengelola usaha	C	Usaha tidak berkembang, modal hilang	Pelatihan manajemen usaha dan pendampingan bisnis	2	3	6	R	Meningkatkan program edukasi dan mentoring usaha	Kepala Jawatan Kemakmuran	Maret s.d Juli 2024	
									2	Pemasaran produk tidak optimal	Kurangnya jaringan pemasaran dan daya saing rendah	C	Produk sulit terjual, pendapatan minim	Pendampingan pemasaran, pelatihan digital marketing, dan pameran produk lokal	2	4	8	R	Meningkatkan akses ke pasar digital dan memperluas jaringan distribusi			

Kode						Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Tujuan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu	Ket
									No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																						
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>																						
7	01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	155,690,000	Tersedianya kebutuhan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menciptakan keamanan wilayah	1	Kurangnya koordinasi antar instansi	Perbedaan kebijakan, komunikasi tidak efektif	C	Pelayanan masyarakat terganggu, tumpang tindih kewenangan	Rapat koordinasi berkala, pembentukan forum komunikasi	2	3	6	R	Peningkatan sistem komunikasi terpadu	Kepala Jawatan Keamanan	Januari s.d Desember 2025	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																						
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>																						
7	01	05	2.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5,125,000	Tersedianya kegiatan pendukung meningkatnya rasa cinta tanah air dan kebangsaan.	1	Minimnya partisipasi peserta	Kurangnya sosialisasi atau kurangnya minat peserta	C	Kurangnya efektivitas program pembinaan	Sosialisasi yang lebih luas dan penyesuaian metode pembinaan agar lebih menarik	1	3	3	R	Menyediakan insentif bagi peserta dan memperbaiki strategi komunikasi	Kepala Jawatan Praja	Oktober 2025	

Kode						Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Tujuan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu	Ket					
1	2	3	4	5	6				7	8					9	No.	Pernyataan Risiko	12					13	14	15	K	D
									2	Kendala teknis dalam penyampaian materi	Gangguan jaringan internet (jika daring), peralatan presentasi tidak berfungsi	C	Penyampaian materi terganggu dan pemahaman peserta berkurang	Pengecekan teknis sebelum acara dan menyiapkan peralatan cadangan	1	3	3	R	Menyediakan teknisi siaga dan alternatif metode penyampaian								
							4,179,269,037																				

Bantul, 5 Maret 2025

Panewu Kretek



Gahya Widada, S. Sos., MH  
 Pembina Tingkat I. IV/b  
 NIP. 197104111991011001